

MANAJEMEN PENDAPATAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: ANALISIS KRITIS

Zakiyah Zulfa Rahmah^{1*}, Yuliani², Binti Mutfarida³, Chamdan Purnama⁴, Dinda Fatmah⁵, Mirhamida Rahmah⁶, Syaiful Hasani⁷, Yusriyah Rahmah⁸

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 7 Kediri, Indonesia, 64127

^{4,5,6} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar, Mojokert, Jl. Raya Brangkal No.70, Kedung Maling 3, Kedungmaling, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61361

^{7,8} Universitas Brawijaya Malang, Jl. Veteran No.10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima, 29/04/2024

Diperbaiki, 19/06/2024

Disetujui, 20/06/2024

Tersedia daring, 24/06/2024

Keywords:

Financial Management; National Income; Welfare; Islamic Economics

Kata Kunci:

Manajemen Keuangan; Pendapatan Nasional; Kesejahteraan; Ekonomi Islam

DOI:

<https://doi.org/10.29313/performa.v2i1.3713>

ABSTRACT

This study aims to review the concept of national income as a measure of welfare from an Islamic economic perspective, with an emphasis on national financial management. National income is often used as the main indicator of a country's welfare, but this approach has limitations in reflecting true welfare. In Islamic economics, welfare is measured not only from the material aspect but also includes spiritual and moral dimensions. This research proposes a financial management model that integrates the principles of Islamic economics to achieve more comprehensive welfare. Through the literature study method and bibliometric analysis, this research identifies the weaknesses of conventional approaches and offers a more inclusive alternative. The results of this study are expected to provide practical recommendations for policy makers and financial management practitioners in designing more sustainable and inclusive policies, in accordance with Islamic economic values. As such, this research contributes to the development of a more holistic financial management theory and practice, and supports the achievement of broader and more sustainable welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan dari perspektif ekonomi Islam, dengan penekanan pada manajemen keuangan nasional. Pendapatan nasional kerap digunakan sebagai indikator utama kesejahteraan suatu negara, namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur tidak hanya dari aspek material tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Penelitian ini mengusulkan model manajemen keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan yang lebih komprehensif. Melalui metode studi literatur dan analisis bibliometrik, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan pendekatan konvensional dan menawarkan alternatif yang lebih inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan dan

praktisi manajemen keuangan dalam merancang kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik manajemen keuangan yang lebih holistik, serta mendukung tercapainya kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan.

© 2024 JMB. All rights reserved

* Email: zrahmah44@gmail.com.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pemikiran Natadipurba, Kehidupan umat Islam dipengaruhi secara keseluruhan oleh ajaran Islam, sehingga ekonomi Islam merupakan bagian penting dari agama itu sendiri dan bukan hanya hasil dari tindakan ekonomi. Masalah keuangan Islam terkait dengan sejarah kenabian dan umat manusia secara keseluruhan. Suma menyatakan bahwa konsep keadilan dan pemerataan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW adalah dasar kebijakan ekonomi Islam. Untuk mencapai kebahagiaan umum, negara diharapkan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' kini maupun di masa depan.(Natadipurba, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dan Penanda utama kondisi ekonomi makro suatu negara adalah pendapatannya. Pendapatan nasional total dan per kapita secara teoritis meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Ini dilakukan dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. "Produk Nasional Bruto" (GNP) dan "Produk Domestik Bruto" (PDB) adalah beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan "pendapatan nasional" atau "Pendapatan Nasional (NI), yang semuanya merujuk pada konsep yang sama. Setiap tahun, ketiga ide ini digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Jika ada kecenderungan untuk peningkatan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu, ekonomi tersebut dikatakan mengalami pertumbuhan.(Patta Rapanna & Zulfikry Sukarno SE, 2017).

Pendapatan nasional memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan baik untuk masyarakat umum maupun untuk kelompok masyarakat tertentu. Sebagai contoh, perubahan pendapatan nasional sangat terkait dengan petani. Harga produk pertanian turun seiring penurunan pendapatan nasional. Selain itu, hal ini berdampak pada lapangan kerja dan peluang bisnis; penurunan pendapatan publik akan menyebabkan pengangguran meningkat dan kemungkinan bisnis baru akan berkurang. Masalah ekonomi akan muncul jika pendapatan dan produk nasional menurun. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ekonomi dan kebangsaan, tujuan pembangunan yang paling penting adalah meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami definisi pendapatan nasional, perspektif dari pendekatan ekonomi Islam terhadap pendapatan nasional, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan tersebut.(Hasan et al., 2023)

Pendapatan nasional telah lama dijadikan sebagai indikator utama dalam mengukur kesejahteraan suatu negara. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Menurut perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan diukur dari sudut pandang spiritual dan moral, serta dari sudut pandang material. Karena itu, perlu adanya pendekatan baru dalam manajemen pendapatan nasional yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan dengan fokus pada aspek manajemen keuangan dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam praktik, penelitian ini menawarkan model manajemen keuangan yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dan praktisi manajemen keuangan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Definisi Pendapatan Nasional dalam Prespektif Islam

Penelitian ini didasarkan pada beberapa landasan teori utama yang berkaitan dengan konsep pendapatan nasional dari sudut pandang ekonomi konvensional dan Islam. Pertama, teori ekonomi makro menjelaskan indikator utama pendapatan nasional, seperti Pendapatan Nasional Bruto (GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, konsep pendapatan dalam ekonomi Islam mencakup zakat,

infaq, sedekah, ghanimah, ushr, jizyah, kharaj, pajak pertambangan, dan wakaf. Ketiga, teori Keynesian menekankan hubungan antara investasi, konsumsi, dan pendapatan nasional

Perspektif ekonomi Islam, teori distribusi pendapatan menekankan pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pendekatan ini berbeda dengan teori konvensional yang lebih menekankan pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan landasan utama dalam ekonomi Islam, yang tercermin dalam kewajiban zakat dan instrumen-instrumen fiskal lainnya yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Pendekatan untuk memahami pendapatan nasional telah mengalami perkembangan dan kontroversi sejak Sir William Petty pertama kali mengusulkannya pada tahun 1665. Konsep ini mencakup total pendapatan suatu negara sepanjang tahun dari berbagai sumber, seperti campuran, upah, keuntungan, bunga, sewa, dan lainnya. Namun, pandangan modern mengenai pendapatan nasional telah berkembang, dengan beberapa ekonom percaya bahwa indikator utama aktivitas ekonomi sebenarnya adalah output barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara setiap tahun. (Rapanna, 2022).

Pendapatan nasional adalah total uang yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, menurut Suleman. Pendekatan lain, seperti yang disampaikan oleh Yanto, menggambarkan pendapatan nasional sebagai ukuran nilai output suatu negara dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Untuk mengestimasi, indikator seperti PDB atau GNP digunakan, yang mencerminkan nilai total tenaga kerja dan produk yang dihasilkan di dalam dan di luar negeri dalam periode waktu tertentu. (MOHAMAD, 2022).

Konsep pendapatan nasional juga melibatkan pengertian tentang upah publik, yang merupakan jumlah gaji yang diperoleh oleh komponen produksi yang menghasilkan tenaga kerja dan produk selama satu tahun. Pendapatan nasional adalah pengukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara setiap tahun. Itu juga dapat digunakan untuk meramalkan perkembangan ekonomi di masa depan. Misalnya, pelaku bisnis dapat menggunakan data pendapatan nasional untuk merencanakan kegiatan ekonomi dan membuat strategi pertumbuhan yang tepat untuk negara. (Fatihudin, 2019).

Selain itu, pendapatan nasional suatu negara dipengaruhi oleh komponen seperti permintaan, tabungan, investasi, dan konsumsi, serta penawaran dan permintaan agregat. Ada tiga pendekatan utama untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Setiap pendekatan menawarkan cara yang berbeda untuk memahami dan mengukur pendapatan nasional suatu negara, dan masing-masing memberikan hasil yang berbeda signifikan dalam analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan. (Adinugraha et al., 2019).

Susunan GNP

Menurut (Darwin Lie et al., 2022), struktur GNP suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: 1. Struktur Ekonomi: Setiap negara memiliki struktur ekonomi yang berbeda untuk meningkatkan GNP-nya; beberapa negara masih bergantung pada sektor tertentu seperti pertanian, industri, atau jasa, tetapi banyak negara yang menggabungkan struktur ekonomi mereka untuk meningkatkan GNP. 2. Kebutuhan: Perekonomian suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang tidak hanya diperlukan untuk kepentingan negara atau rakyatnya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan negara itu sendiri. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan tabungannya dengan tujuan meningkatkan barang-barang modalnya.

Berdasarkan berbagai definisi GNP, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pendapatan Nasional Bersih adalah penyusutan tahunan dari semua barang modal tetap yang digunakan dalam produksi dibagi dengan total produk nasional bruto. 2. Pendapatan Nasional Bruto adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri (domestik) dan pendapatan bersih luar negeri.

Faktor Yang Mempengaruhi GNP

Menurut Winardi, perbedaan dalam GNP antara berbagai negara dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, termasuk (Dora et al., 2018): Faktor Geografis dan Lingkungan Alamiah: Ini mencakup ukuran wilayah, iklim, sumber daya alam, dan topografi. Faktor demografi seperti jumlah dan struktur penduduk, tingkat urbanisasi, dan tingkat migrasi dapat mempengaruhi potensi ekonomi suatu negara. Faktor Ekonomi: Sektor ekonomi yang dominan, tingkat industrialisasi, produktivitas tenaga kerja, ketersediaan modal, dan teknologi adalah beberapa faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa serta kebutuhan tenaga kerja. Kapasitas produksi dan daya saing ekonomi suatu negara dipengaruhi secara signifikan oleh komponen ini. Faktor Politik dan Sosial: seperti stabilitas politik,

kebijakan ekonomi pemerintah, tingkat korupsi, dan keamanan nasional. Ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi suatu negara. Faktor sejarah seperti tradisi, sejarah kolonialisme, dan hubungan internasional. Faktor-faktor ini dapat memberikan konteks historis yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara.

Interaksi dari berbagai faktor ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu negara dan perbedaan PDB per kapita antara negara. Sebagai contoh, suatu negara dapat memiliki GNP per kapita yang rendah meskipun memiliki populasi yang besar. Dari tahun 1973 hingga 1980, Indonesia memiliki PDB yang lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya dan beberapa negara Asia lainnya, tetapi PDB per kapita Indonesia tetap rendah atau bahkan lebih rendah dari negara-negara ASEAN dan Asia lainnya. Ini karena populasi Indonesia yang lebih besar. (Huda & others, 2018).

Jenis-jenis Pendapatan Nasional

1. Gross Domestic Bruto Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh unit produksi dalam wilayah suatu negara selama satu tahun disebut produk domestik bruto. Angka ini mencakup barang dan layanan yang dibuat oleh perusahaan luar negeri atau individu yang bekerja di daerah tersebut. Pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung dengan rumus $GNP (Y) = C + I + G + (X - M)$. Di sini, C adalah konsumsi masyarakat, I adalah investasi, G adalah konsumsi pemerintah, dan X adalah ekspor dan M adalah impor.
2. Net National Product Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu periode, setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi, serta barang pengganti modal, disebut produk nasional netto. Rumusnya, $NNP = GNP$ dikurangi penurunan.
3. Net National Income Pendapatan nasional adalah jumlah uang yang diterima oleh penduduk suatu negara setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya adalah $NNI = NNP - \text{pajak tidak langsung} + \text{subsidi}$.
4. Personal Income Setelah dikurangi dari laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan transfer pembayaran, pendapatan personal adalah total yang diterima oleh masyarakat. Secara matematis, $PI = NNI$ dikurangi dari (iuran sosial, asuransi, laba ditahan, dan pajak perusahaan).
5. Disposable Income Total pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan tersedia untuk diinvestasikan atau dikonsumsi disebut pendapatan personal tidak dapat diakses. Secara matematis, $DI = PI - \text{pajak langsung}$. (Faizin, 2021).

Tujuan Menghitung Pendapatan Nasional

Menghitung pendapatan nasional memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Pendapatan nasional digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Pemerintah dapat menilai kesejahteraan ekonomi negara dengan mengetahui pendapatan nasional; 2. Perhitungan pendapatan nasional membantu dalam memperkirakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat selama satu tahun. Perhitungan ini penting untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara; 3. Data pendapatan nasional membantu pemerintah menemukan area kemajuan ekonomi yang potensial. (Kurniawan, 2020).

Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Selain tujuan-tujuan di atas, perhitungan pendapatan nasional juga memberikan berbagai manfaat, di antaranya sebagai berikut (Syafuruddin & Darwis, 2021): 1. Memahami Struktur Perekonomian Negara: Pendapatan nasional membantu kita memahami struktur ekonomi negara dengan lebih baik. Oleh karena itu, dapat berkontribusi pada pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih efisien. 2. Mempertimbangkan Kondisi Ekonomi Antara Lokal atau Wilayah: Dengan menganalisis dan membandingkan pendapatan di berbagai wilayah, pemerintah dapat menemukan kesenjangan ekonomi dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. 3. Selain itu, mengevaluasi kondisi ekonomi dari berbagai negara berdasarkan pendapatan nasional memungkinkan untuk membandingkan kondisi ekonomi suatu negara dengan kondisi ekonomi negara lain. Hal ini dapat membantu menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih efisien. 4. Membantu Pemerintah dalam Membuat Kebijakan Ekonomi Data tentang pendapatan nasional dapat digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik. Pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya dengan

memahami situasi ekonomi negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis konsep pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Metode kajian pustaka ini melibatkan beberapa langkah: pertama, identifikasi literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang membahas topik pendapatan nasional dan ekonomi Islam. Kedua, evaluasi kritis terhadap literatur yang telah diidentifikasi untuk menilai relevansi, validitas, dan kontribusi setiap sumber terhadap topik yang diteliti. Ketiga, sintesis temuan dari berbagai sumber untuk mengembangkan kerangka konseptual yang komprehensif mengenai manajemen pendapatan nasional dalam ekonomi Islam (Pangesty & Prasetya, 2021).

Dalam proses analisis, penelitian ini mengadopsi beberapa alat analisis studi literatur, antara lain:

1. Meta-analisis: Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menggabungkan hasil dari berbagai studi yang memiliki kesamaan topik untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam.
2. Analisis Isi: Teknik ini diterapkan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren dalam literatur yang telah dikumpulkan, sehingga dapat mengungkap aspek-aspek penting yang berkaitan dengan manajemen pendapatan nasional.
3. Sistematis Review: Proses ini melibatkan pencarian literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci tertentu dan kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memastikan bahwa semua sumber yang relevan dan berkualitas tinggi telah dipertimbangkan.

Dengan menggabungkan berbagai alat analisis ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep pendapatan nasional dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anas Febrian, telah diidentifikasi bahwa pendekatan konvensional terhadap pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan memerlukan pemikiran ulang yang kritis dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator seperti PDB dan GNI tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang holistik, terutama dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang diutamakan dalam ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep seperti zakat, sedekah, infaq, dan wakaf, pendekatan ini dapat menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan inklusif untuk mengukur kesejahteraan. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan transparansi dalam pelaporan aktivitas ekonomi dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan dampak positif dari program-program kesejahteraan. Dengan demikian, melalui implementasi rekomendasi ini, kita dapat memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Parikh, 2023).

Penggunaan Produk Domestik Bruto (GNP) sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi konvensional telah menjadi kontroversial. Ada beberapa alasan mengapa GNP sulit digunakan sebagai ukuran pendapatan nasional atau untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan negara. Pertama dan terpenting, perhitungan GNP hanya melihat barang yang masuk ke pasar, bukan barang yang diproduksi atau dikonsumsi secara sendiri. Kedua, GNP tidak memperhitungkan waktu rekreasi, yang merupakan bagian penting dari kesejahteraan. Ketiga, GNP juga tidak memperhitungkan masalah polusi, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Purnama & others, 2010).

Dalam kerangka keuangan Islam, penting untuk menghitung tingkat bantuan moneter dan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam konteks moral dan sosial Islam. Pendapatan Nasional dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi Islam dengan mempertimbangkan distribusi pendapatan rumah tangga, produksi barang publik, dan konsumsi masyarakat sebagai persentase dari total konsumsi. Selain itu, perhitungan pendapatan nasional juga harus mempertimbangkan penggunaan zakat, wakaf, dan iuran untuk mendapatkan bantuan individu dari pemerintah. Oleh karena itu, aspek mikro ekonomi Islam sangat terkait dengan keadaan ekonomi makro. (Purnama, 2015a) (Ulya, 2021).

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Gross Domestic Product (GDP) dan Gross National Income (GNI) adalah dua indikator yang sering digunakan untuk mengukur pendapatan nasional. GDP adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang

diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya setahun, sementara GNI mencakup pendapatan total yang diperoleh oleh warga negara. tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indikator-indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang aktivitas ekonomi dan kemakmuran ekonomi suatu negara. (Fadillah et al., 2023).

Namun, indikator-indikator ini memiliki kelemahan signifikan. GDP dan GNI hanya mengukur output ekonomi dan tidak memperhitungkan distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan faktor-faktor sosial lainnya tidak tercermin dalam angka-angka ini. Akibatnya, sebuah negara bisa saja memiliki GDP yang tinggi, namun banyak penduduknya yang hidup dalam kemiskinan. (Hanum et al., 2019).

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sudut pandang Islam, manusia dianggap sebagai pemimpin dunia. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan bumi dan isinya sebagai khalifah, dan mereka harus melakukannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia. Semua aspek kehidupan dimasukkan dalam Islam, termasuk ibadah dan hubungan sosial. Ibadah adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan ketaatan dan hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan. Selain itu, ibadah juga berfungsi sebagai pengingat akan tugas yang dimiliki manusia untuk menjaga Bumi. Hubungan sosial diizinkan oleh Islam dengan mengakui adanya prinsip-prinsip tetap (tsawabit) dan variabel (mutaghayyirat). Larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan penggunaan zakat dalam bidang ekonomi adalah beberapa prinsip ekonomi Islam. (Purnama, 2015b) (Arif, 2022).

Menurut Abdul Mun'in al-Jamal, ekonomi Islam terdiri dari prinsip ekonomi umum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penggunaan syariah dalam kegiatan ekonomi adalah inti dari ekonomi Islam. Penggunaan ini dapat membantu mengatasi masalah keuangan publik. Konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang berkaitan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang melarang riba. (Ervanni et al., 2024).

Negara mengadopsi sistem ekonomi Islam untuk mencapai beberapa tujuan. Pertama, memasukkan hukum Islam ke dalam sistem ekonomi secara menyeluruh untuk memberikan karakter material dan spiritual kepada masyarakat. Kedua, mengakhiri keterbelakangan ekonomi negara-negara Muslim dan membebaskan masyarakat Muslim dari ketergantungan pada sistem ekonomi kapitalis Barat dan komunis Timur. Ketiga, melindungi masyarakat dari materialisme dan hedonisme serta mempromosikan nilai-nilai Islam dalam semua upaya ekonomi. Keempat, membangun sistem ekonomi yang mendorong persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Muslim. Lima, mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Purnama & Subroto, 2016) (Syarif, 2021).

Ekonomi Islam menawarkan pandangan yang lebih holistik mengenai pendapatan nasional. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat diukur tidak hanya berdasarkan output ekonomi, tetapi juga dari bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama Keadilan sosial, pembagian kekayaan yang adil, dan kesejahteraan kolektif. (Aulia, 2022).

Distribusi kekayaan adalah komponen kunci dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk membagikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, seperti infaq dan sedekah. Infaq dan sedekah adalah sumbangan sukarela yang juga dianjurkan dalam Islam. (Mutsanna & Sukirno, 2020).

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan penggunaan aset-aset produktif untuk kesejahteraan umum melalui konsep waqf. Waqf adalah bentuk endowment di mana aset-aset seperti tanah atau bangunan dialokasikan untuk tujuan sosial dan tidak boleh dijual atau diwariskan. Aset-aset ini dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan lainnya. (Silvia Indrarini & others, 2019).

Indikator Kesejahteraan yang Lebih Holistik

Untuk mengukur kesejahteraan secara lebih holistik, ekonomi Islam menggunakan berbagai indikator yang mencakup aspek-aspek sosial dan ekonomi. Beberapa indikator utama adalah (Sukirno & Adhim, 2020) (Jajuli & others, 2017): 1. Zakat berfungsi sebagai cara yang efektif untuk menyebarkan kekayaan. Zakat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan bahwa orang miskin dan yang membutuhkan menerima bantuan keuangan. 2. Infaq dan Sedekah: Sumbangan sukarela yang mendukung kemakmuran masyarakat dikenal sebagai infaq dan sedekah. Sumbangan ini dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial, seperti bantuan

kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan. 3. Waqf memungkinkan aset produktif digunakan untuk kepentingan umum dan jangka panjang. Misalnya, aset waqf dapat digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat lainnya. .

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan nasional. Indikator-indikator ini tidak hanya mencerminkan output ekonomi tetapi juga distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial, yang merupakan bagian penting dari mencapai keadilan sosial. (Yuniasih & Watini, 2022).

Manajemen Keuangan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Manajemen keuangan dalam ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama yang memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip ini adalah (Lestari, n.d.) (Aini & others, 2019)..:

1. Keadilan: Keadilan adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Semua transaksi keuangan harus adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Riba (bunga) dilarang karena dianggap eksploitatif. Gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) juga dilarang karena menciptakan ketidakpastian dan spekulasi yang berisiko.
2. Kepemilikan Relatif: Dalam Islam, semua harta pada dasarnya adalah milik Allah, dan manusia hanya sebagai pengelola (khalifah) yang bertanggung jawab. Prinsip ini mengingatkan bahwa kekayaan harus digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak boleh disalahgunakan.
3. Zakat dan Redistribusi Kekayaan: Zakat adalah pilar penting dalam manajemen keuangan Islam. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu dan bertujuan untuk redistribusi kekayaan. Dengan memastikan bahwa sebagian kekayaan diberikan kepada yang membutuhkan, zakat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Studi Kasus: Penerapan Manajemen Keuangan dalam Ekonomi Islam

Salah satu contoh penerapan manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dapat dilihat di negara Malaysia. Malaysia memiliki sistem keuangan Islam yang maju dan terintegrasi. Salah satu komponen penting dari sistem ini adalah pengelolaan zakat. (Wibisana, 2016). Malaysia, pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan transparan melalui institusi-institusi zakat yang resmi. Institusi-institusi ini mengumpulkan zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Zakat digunakan untuk program kesejahteraan yang berbeda, seperti bantuan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Pengelolaan zakat yang terpusat dan transparan memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu individu yang membutuhkan tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Rekomendasi Kebijakan untuk Manajemen Pendapatan Nasional

Untuk para pembuat kebijakan, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan manajemen pendapatan nasional sesuai dengan prinsip ekonomi Islam:

1. Implementasi Sistem Zakat Terpusat: Mendirikan badan zakat nasional yang terpusat dan transparan untuk memastikan distribusi zakat yang adil dan efisien. Badan ini harus memiliki mekanisme pengumpulan dan distribusi yang jelas dan akuntabel.
2. Promosi Infaq dan Sedekah: Mendorong partisipasi masyarakat dalam infaq dan sedekah melalui insentif pajak dan kampanye kesadaran. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada individu dan perusahaan yang memberikan sumbangan infaq dan sedekah.
3. Pengembangan Waqf: Mengembangkan regulasi dan infrastruktur untuk memfasilitasi pendirian dan pengelolaan waqf. Pemerintah dapat menyediakan dukungan teknis dan finansial untuk pengembangan waqf, serta memastikan bahwa aset-aset waqf dikelola secara efisien dan transparan.

Implementasi Kebijakan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan

Implementasi kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan melalui membuat peluang ekonomi lebih adil dan membagi kekayaan. Misalnya, dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk program yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pengembangan waqf dapat menyediakan sumber daya finansial yang berkelanjutan untuk proyek-proyek sosial dan infrastruktur. Dengan memanfaatkan aset-aset waqf untuk membiayai sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.

Strategi Manajerial untuk Kesejahteraan Nasional

Praktisi manajerial di sektor publik dan swasta dapat menerapkan strategi-strategi berikut untuk mendukung kesejahteraan nasional:

1. Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Perencanaan Keuangan: Menggabungkan prinsip seperti zakat, infaq, dan waqf dalam perencanaan keuangan perusahaan dan institusi publik. Perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dari keuntungan mereka untuk program-program kesejahteraan sosial, sementara institusi publik dapat memastikan bahwa anggaran mereka mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan redistribusi kekayaan.
2. Pengembangan Produk Keuangan Islam: Mengembangkan produk keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan asuransi syariah Takaful. Sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang signifikan., sementara takaful dapat menyediakan perlindungan keuangan yang adil dan transparan bagi semua anggota masyarakat.
3. Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat dan Waqf: Memanfaatkan dana zakat dan waqf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat dapat digunakan untuk program pelatihan dan pemberdayaan usaha kecil, sementara aset waqf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.

Dampak Strategi ini terhadap Kesejahteraan

Strategi-strategi ini dapat membantu mencapai kesejahteraan yang lebih komprehensif dengan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Misalnya, dengan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk program-program kesejahteraan sosial, perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengembangan produk keuangan Islam juga dapat membuka peluang bagi investasi yang etis dan berkelanjutan. Produk-produk seperti sukuk dan takaful tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan waqf dapat membantu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan finansial, program-program ini dapat membantu individu dan keluarga keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.

Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam mengukur dan mengelola kesejahteraan nasional. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, dan waqf, pengukuran kesejahteraan dapat lebih mencerminkan distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Implementasi kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip ini serta strategi manajerial yang tepat dapat membantu mencapai kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan digunakan untuk kebaikan bersama, ekonomi Islam menawarkan jalan menuju kesejahteraan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berikut adalah pembaruan tabel rangkuman studi sebelumnya yang kini mencakup topik manajemen pendapatan nasional dalam perspektif Islam:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu Tentang manajemen pendapatan nasional dalam perspektif Islam

No.	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Rekomendasi
1.	Fauzan Maulana (Kodja et al., 2024).	Pengembangan SDM dan Disiplin Kerja di Unkhair Pengaruh pengembangan SDM dan	Pengaruh pengembangan SDM dan disiplin kerja terhadap good governance dan kinerja pegawai	Pengembangan kompetensi pegawai dan tata kelola organisasi yang lebih baik berpengaruh signifikan	Fokus pada pengembangan kompetensi pegawai dan peningkatan tata kelola organisasi untuk

		disiplin kerja terhadap good governance dan kinerja pegawai		terhadap good governance dan kinerja pegawai	meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam
2.	(Ervanni et al., 2024).	Pemikiran Kritis Pendapatan Nasional sebagai Ukuran Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam	Keterbatasan indikator konvensional (PDB, GNI) dalam mencerminkan kesejahteraan holistik	Indikator konvensional tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan holistik, terutama terkait keadilan sosial dan distribusi kekayaan	Integrasi konsep zakat, sedekah, infaq, dan wakaf; peningkatan transparansi dalam pelaporan aktivitas ekonomi; kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan program kesejahteraan
3.	Parikh (2023)	Integrasi Konsep Ekonomi Islam dalam Pengukuran Kesejahteraan Nasional	Pengukuran kesejahteraan nasional dalam perspektif ekonomi Islam	Pendekatan ekonomi Islam yang mengintegrasikan zakat, sedekah, infaq, dan wakaf dapat menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan inklusif	Implementasi rekomendasi untuk memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat
4.	Rahmawati et al. (2024)	Manajemen Pendapatan Nasional dalam Perspektif Islam	Prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam ekonomi Islam dan implementasinya dalam pengelolaan pendapatan nasional	Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan redistribusi kekayaan harus diintegrasikan dalam manajemen pendapatan nasional. Zakat, infaq, sedekah, dan waqf memainkan peran kunci	Pembentukan badan zakat nasional yang terpusat, promosi infaq dan sedekah, pengembangan regulasi waqf, dan peningkatan transparansi pelaporan aktivitas ekonomi

Pengembangan SDM dan Tata Kelola Organisasi

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Maulana Kodja dan timnya (2024) menunjukkan bahwa pengembangan SDM dan disiplin kerja di Universitas Khairun (Unkhair) berpengaruh signifikan terhadap good governance dan kinerja pegawai. Hal ini penting karena dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola organisasi yang baik sangatlah penting. Pengembangan kompetensi pegawai tidak hanya meningkatkan kinerja individu tetapi juga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Tata kelola organisasi yang baik mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang semuanya merupakan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam ekonomi Islam.

Dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan, serta memperbaiki tata kelola organisasi, kesejahteraan pegawai dapat ditingkatkan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pegawai itu sendiri tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan, karena kinerja yang baik akan mendukung tercapainya tujuan-tujuan organisasi yang lebih besar, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Konvensional dan Pemikiran Kritis dalam Ekonomi Islam

Penelitian Anas Febrian (2024) menekankan bahwa pendekatan konvensional terhadap pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan memerlukan pemikiran ulang yang kritis dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator seperti PDB dan GNI, meskipun berguna, tidak mencerminkan kesejahteraan yang holistik, terutama dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang diutamakan dalam ekonomi Islam.

Integrasi konsep zakat, sedekah, infaq, dan wakaf menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif untuk mengukur kesejahteraan. Zakat, misalnya, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang tetapi didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Sedekah dan infaq juga memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial, sementara wakaf menyediakan sumber daya jangka panjang untuk proyek-proyek sosial.

Peningkatan transparansi dalam pelaporan aktivitas ekonomi dan kolaborasi dengan pihak eksternal juga direkomendasikan untuk mengoptimalkan dampak positif dari program-program kesejahteraan. Transparansi adalah prinsip kunci dalam ekonomi Islam yang memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas ekonomi dilakukan secara jujur dan adil, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efisiensi alokasi sumber daya.

Integrasi Konsep Ekonomi Islam dalam Pengukuran Kesejahteraan

Penelitian Parikh (2023) menegaskan pentingnya integrasi konsep ekonomi Islam dalam pengukuran kesejahteraan nasional. Pendekatan ini mengakui keterbatasan indikator konvensional seperti PDB dan GNI dalam mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Dengan mengintegrasikan konsep zakat, sedekah, infaq, dan wakaf, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan inklusif.

Implementasi rekomendasi dari penelitian ini dapat memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, yang semuanya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan waqf yang efektif dapat menyediakan sumber daya finansial yang berkelanjutan untuk mendukung proyek-proyek sosial dan infrastruktur, membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Manajemen Pendapatan Nasional dalam Perspektif Islam

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2024) membahas prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam ekonomi Islam dan implementasinya dalam pengelolaan pendapatan nasional. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan redistribusi kekayaan sangat ditekankan dalam manajemen keuangan Islam. Zakat, infaq, sedekah, dan waqf adalah instrumen utama yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pendapatan nasional dikelola dengan cara yang mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Pembentukan badan zakat nasional yang terpusat dan transparan adalah salah satu rekomendasi utama untuk meningkatkan manajemen pendapatan nasional. Promosi infaq dan sedekah melalui insentif pajak dan kampanye kesadaran juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program kesejahteraan. Pengembangan regulasi dan infrastruktur untuk waqf akan membantu dalam memfasilitasi pendirian dan pengelolaan waqf yang efektif, sementara peningkatan transparansi dalam pelaporan aktivitas ekonomi akan memastikan bahwa semua transaksi dan alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan terbuka.

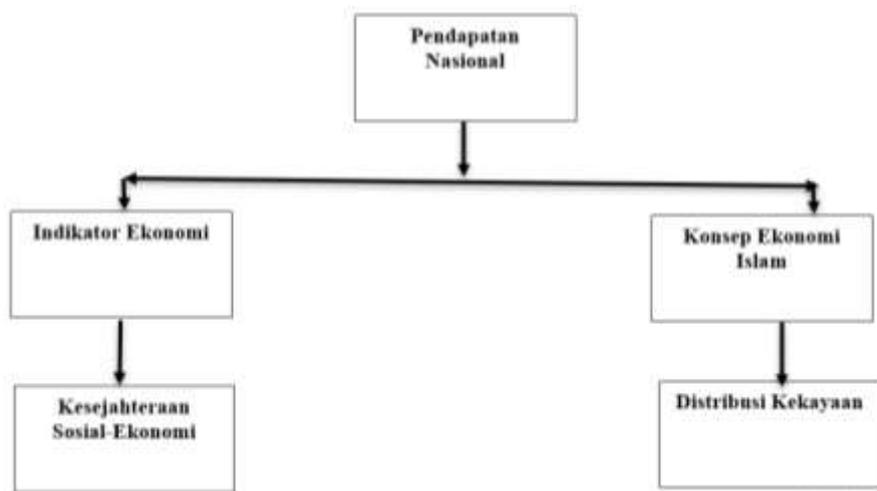
Studi-studi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam mengukur dan mengelola kesejahteraan nasional. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, infaq, dan wakaf, pengukuran kesejahteraan dapat lebih mencerminkan distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Implementasi kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip ini serta strategi manajerial yang tepat dapat membantu mencapai kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengukuran kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan indikator konvensional seperti GDP dan GNI seringkali tidak mencerminkan kesejahteraan yang holistik. Indikator-indikator ini hanya mengukur output ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial.

Sebaliknya, Menurut perspektif ekonomi Islam, output ekonomi bukan satu-satunya cara untuk mengukur kesejahteraan distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Konsep-konsep seperti zakat, infaq, dan sedekah memainkan peran penting dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Untuk lebih memahami bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam dapat digunakan dalam pengukuran kesejahteraan, dibuatlah sebuah conceptual framework yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang relevan. Gambar 1 menunjukkan bagaimana pendapatan nasional (national income) terhubung dengan indikator ekonomi dan konsep ekonomi Islam, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan sosial-ekonomi.

Gambar 1: Skema hubungan antara pendapatan nasional (national income) kesejahteraan sosial-ekonomi.



Framework ini memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat menguji hipotesis tentang efektivitas konsep ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Misalnya, penelitian dapat dilakukan untuk menguji apakah negara-negara yang menerapkan konsep zakat dan infaq secara sistematis menunjukkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang hanya mengandalkan indikator ekonomi konvensional.

Dengan menggunakan framework ini, penelitian selanjutnya dapat lebih fokus dan objektif dalam mengevaluasi dampak dari konsep ekonomi Islam terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi. Hal ini juga membantu mengurangi subjektivitas dalam analisis deskriptif dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Studi ini menunjukkan bahwa pengukuran kesejahteraan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Dengan integrasi konsep zakat, infaq, dan sedekah, pengukuran kesejahteraan tidak hanya fokus pada output ekonomi tetapi juga pada distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Framework konseptual yang diusulkan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi Islam terhadap pendapatan nasional dan manajemen keuangan menawarkan perspektif yang lebih holistik dan adil dibandingkan pendekatan konvensional. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi, serta

menggunakan instrumen seperti zakat dan waqf, ekonomi Islam dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Implementasi strategi manajerial dan kebijakan yang tepat dapat mendukung tujuan ini dan memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional termasuk zakat, sedekah, infak, ushr, jizyah, kharaj, pajak pertambangan, dan wakaf, serta distribusi pendapatan rumah tangga, produksi pedesaan, dan kesejahteraan masyarakat Muslim. Studi ini menemukan beberapa elemen yang memerlukan penelitian tambahan untuk memperluas pemahaman kita tentang pendapatan nasional dari sudut pandang ekonomi Islam.. Pertama, penelitian empiris mengenai implementasi konsep-konsep ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, analisis perbandingan antara efektivitas instrumen-instrumen fiskal dalam ekonomi Islam dan konvensional dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketiga, studi longitudinal tentang dampak penerapan zakat dan instrumen-instrumen lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan distribusi pendapatan mayoritas Muslim.

Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi interaksi antara faktor-faktor eksternal seperti globalisasi ekonomi dan kebijakan perdagangan internasional dengan pendekatan ekonomi Islam terhadap pendapatan nasional. Selain itu, kajian tentang peran lembaga-lembaga keuangan Islam dalam mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional juga merupakan area yang menjanjikan untuk diteliti lebih lanjut. Dengan Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang lebih menyeluruh dalam memahami konsep pendapatan nasional dari sudut pandang ekonomi Islam dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian selanjutnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Halal lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 57–81.
- Aini, I., & others. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Arif, M. (2022). *Filsafat ekonomi islam*. Merdeka Kreasi Group.
- Aulia, T. (2022). *Analisis Pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kasus 5 Kabupaten/Kota)*. Universitas Hasanuddin.
- Darwin Lie, S. E., MM, L. E. N., Nana Triapnita Nainggolan, S. E., MM, L. D. S., SE, M. A., Hery Pandapotan Silitonga, S. E., & others. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. CV. Azka Pustaka.
- Dora, N., Endayani, H., & others. (2018). *Pengantar Ilmu Sosial*.
- Ervanni, O. W., Safitri, I., Wulandari, V., Sari, W., Imelia, A. T., Rafli, J. H., Maulana, A., & others. (2024). Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(1), 53–78.
- Fadillah, F., Fadillah, M. R., & Luthfi, M. R. (2023). KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7(2), 1–15.
- Faizin, M. (2021). *Buku Ajar Ekonomi Makro Islam*. Penerbit NEM.
- Fatihudin, D. (2019). *Membedah investasi manuai geliat ekonomi*. Deepublish.
- Hanum, F., Yuan, L. C., Kamahara, H., Aziz, H. A., Atsuta, Y., Yamada, T., & Daimon, H. (2019). Treatment of sewage sludge using anaerobic digestion in Malaysia: Current state and challenges. *Frontiers in Energy Research*, 7, 19.
- Hasan, A., Harahap, A. S., Az-Zahra, M. T., Ibrahim, M., & Zahra, A. A. (2023). Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 19–34.
- Huda, N., & others. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Jajuli, S., & others. (2017). Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam (baitul maal sebagai basis pertama dalam pendapatan Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 8–25.
- Kodja, F. M., Abdullah W. Jabid, & Marwan Man Soleman. (2024). Pengaruh Pengembangan Sdm Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Good Governance Sebagai Variabel Mediasi Pada Universitas Khairun. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 20(2), 124–137. <https://doi.org/10.29313/performa.v20i2.2911>
- Kurniawan, S. A. (2020). Pendapatan Nasioanal Terhadap Hubungan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Jawa Timur. *Pendapatan Nasional Terhadap Hubungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Jawa Timur*, 1–15.
- Lestari, E. P. (n.d.). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- MOHAMAD, F. (2022). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI (Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap)*. UIN. Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Mutsanna, H., & Sukirno, S. (2020). Faktor Determinan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2018. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 290–309.
- Natadipurba, C. (2016). *Ekonomi Islam 101 (Kedua)*. PT Mobidelta Indonesia.
- Pangesty, F. W., & Prasetya, F. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoretis dan Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Parikh, M. S. (2023). An Analysis on CSR Reporting Practices of Asian Paints Limited. *Journal of Management and Administration Provision*, 3(2), 33–39. <https://doi.org/10.55885/jmap.v3i2.272>
- Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.
- Purnama, C. (2015a). Importance of customer relationship management in customer loyalty (Brangkal Offset of East Java, Indonesia). *Journal of International Business Research and Marketing*, 1(1), 28–34.
- Purnama, C. (2015b). The Strategic Experiential Models and Providers in Improving Customer Satisfaction and Loyalty (Study Beverage Bottle Ready to Serve Tea Sosro). *International Journal of Management Sciences*, 5(1), 54–67.
- Purnama, C., & others. (2010). Motivasi dan kemampuan usaha dalam meningkatkan keberhasilan usaha industri kecil (Studi pada industri kecil sepatu di Jawa Timur). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(2), 177–184.
- Purnama, C., & Subroto, W. T. (2016). Competition intensity, uncertainty environmental on the use of information technology and its impact on business performance small and medium enterprises. *International Review of Management and Marketing*, 6(4), 984–992.
- Rapanna, P. (2022). *Ekonomi Makro*.
- Silvia Indrarini, M. M., & others. (2019). *Nilai perusahaan melalui kualitas laba: (Good Governance dan Kebijakan Perusahaan)*. Scopindo Media Pustaka.
- Sukirno, S., & Adhim, N. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 11–24.
- Syafruddin, R. F., & Darwis, K. (2021). *Ekonomi Agroindustri*. Penerbit NEM.
- Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing.
- Ulya, H. N. (2021). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional dan Islam*. Penerbit NEM.
- Wibisana, W. (2016). Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(1).
- Yuniasih, D., & Watini, S. (2022). Penerapan Model ATIK dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini melalui Permainan Lego di RA AL Fikri Klari. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 1651–1658.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan PustakaObor Indonesia, 2014). *Miswar Dan Pangulu Abd. Karim Nasution.. Akhlak Tasawuf. Bandung: Citapustaka Media Perintis.*